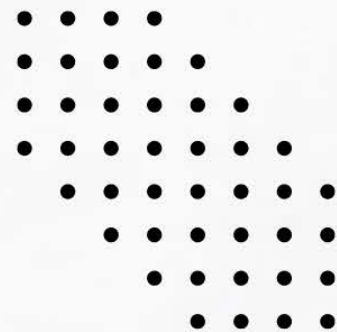




RENJA TAHUN 2025



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA BLITAR**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengacu pada Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 2 ayat (2), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Jenjang perencanaan daerah terdiri dari perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Ketentuan selanjutnya diatur dalam Undang – Undang nomor 23 tahun 2014 pasal 273 (2) dan (3) yang menyebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD. RKPD dimaksud memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 13 Ayat (2) Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Dalam pasal 16 Ayat (2) menyatakan Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan dengan tahapan: a. persiapan penyusunan; b. penyusunan rancangan awal; c. penyusunan rancangan; d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; e. perumusan rancangan akhir; dan f. penetapan. Dengan demikian, pernyataan tahapan penyusunan Renja PD yang terdiri dari 3 (tiga) tahapan utama pada paragraf kedua supaya disempurnakan.

Berdasarkan Pasal 126 Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Setelah disusun berdasarkan tahapan dan tatacara, maka rancangan Renja Perangkat Daerah disempurnakan menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor ... tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Blitar Tahun 2025.

Sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah, maka Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2025 disusun dengan prinsip – prinsip sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021-2026 yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta perkiraan maju;
2. Berpedoman pada hasil evaluasi Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2024 yang bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan / atau kegiatan baru yang disusun dalam Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilakukan dalam rangka

optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

3. Memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi baik untuk tahun 2025 dan perkiraan maju tahun 2026;
4. Penyusunan Renja PD bukan merupakan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD 2025, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.

1.1.1 Keterkaitan antara Renja PD dengan RKPD

Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan, penyusunan renja salah satunya berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selain itu pasal 78 ayat 1 huruf (d) Permendagri nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa penyusunan rancangan awal RKPD mencakup penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Ini artinya antara Renja dan RKPD merupakan satu entitas yang saling melengkapi dimana penyusunan Renja berpedoman pada RKPD, sementara penyusunan Ranwal RKPD mencakup penelaahan terhadap Ranwal Renja Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 berpedoman kepada RKPD Kota Blitar tahun 2025.

1.1.2 Keterkaitan antara Renja PD dengan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah

Selain berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dokumen Renja perangkat Daerah juga berpedoman pada RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah). Pelaksanaan RPJMD setiap tahun dijabarkan ke dalam RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah. Dengan kata lain, RPJMD digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun yang berhubungan dengan tugas pokok fungsi perangkat daerah serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Dalam Permendagri nomor 87 Tahun 2017, disebutkan bahwa sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran Renja Perangkat Daerah, merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi perangkat daerah. Ini artinya harus terdapat kesesuaian antara dokumen renstra dengan dokumen renja Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar tahun 2025 juga berpedoman pada Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026.

1.1.3 Keterkaitan antara Renja PD dengan Renja Kementerian / Lembaga dan Renja Provinsi

Renja Kementerian/lembaga (Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur) tidak terkait secara langsung dalam proses penyusunan Renja PD, seperti halnya Renstra maupun RKPD. Namun Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur perlu ditelaah untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana program provinsi yang dapat berpengaruh langsung terhadap Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar tahun 2025.

1.1.4 Renja dan Tindak lanjutnya dalam APBD

Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2025 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025. Sedangkan RKA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 merupakan salah satu dasar yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang kemudian disahkan sebagai dokumen APBD Kota Blitar. Oleh karena itu Renja merupakan salah satu dokumen penting untuk kemudian ditindaklanjuti dalam APBD Kota Blitar Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

- Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) ;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor ... Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Nomor ... Tahun 2024);
 20. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
 21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
 22. Peraturan Walikota Blitar Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 23. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang

- Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2023 Nomor 65);
24. Peraturan Walikota Blitar Nomor ... Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Disusunnya Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2025 yang menjadi penjabaran RPJMD dan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021 – 2026 serta disusun mengacu pada RKPD Tahun 2025

Adapun Tujuan disusunnya Rencana Kerja Tahun 2025 adalah sebagai pedoman penyusunan KUAPPAS Tahun 2025 dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Blitar Tahun 2025

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 sebagai berikut :

- | | |
|---------|--|
| BAB I | Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan. |
| BAB II | Hasil Evaluasi RENJA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun lalu, berisikan evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun lalu dan Pencapaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah s/d Tahun 2024, Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar, Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. |
| BAB III | Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah, menguraikan mengenai Telaahan terhadap kebijakan nasional, Tujuan dan sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Program dan Kegiatan. |
| BAB IV | Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| BAB V | Penutup, menguraikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah – kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut penyusunan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2025 |

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Guna memastikan kesinambungan serta kesesuaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan realisasinya, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian renstra. Tujuan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian renstra adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra perangkat daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pada bab ini disajikan review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun lalu (2023) dan prakiraan capaian tahun berjalan (2024) dengan mengacu pada APBD tahun 2024. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun – tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Adapun program yang dilaksanakan pada tahun 2023 (n-2) dan tahun 2024 (n - 1) adalah sebagai berikut :

1. Program Penanggulangan Bencana
 2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
- ;

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja dan pencapaian renstra dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2024

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah , Tujuan/Sasaran dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Tujuan. Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran , Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
										Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
1	05					Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat									
						Tujuan : Meningkatnya Kapasitas Ketangguhan terhadap Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,65	0,40	0,58	0,43	74,14	0,60	0,43	66,15
						Sasaran : Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Menghadapi Bencana	Indeks Kapasitas Daerah	0,61	0,40	0,55	0,43	78,18	0,57	0,43	70,49
1	05	03				PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase SDM penanganan bencana yang terlatih	95 %	66	92%	91,47 %	99,42 %	93 %	93 %	97,89 %
							Jumlah kelurahan Tangguh bencana kategori Madya	3 kelurahan	1	2 kelurahan	2 kelurahan	100 %	2 kelurahan	2 kelurahan	66,67 %
							Persentase kelengkapan sarana prasarana pendukung penanganan bencana	80 %	40	50 %	50 %	100 %	60 %	60 %	75 %
							Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1	05	03	2	01		Pelayanan informasi rawan bencana kabupaten / kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1	05	03	2	01	0003	Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten /	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana kabupaten/kota	3800 orang	-	950 orang	950 orang	100 %	950 orang	1900 orang	50 %

						kota (per jenis ancaman bencana)	yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun								
1	05	03	2	02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1	05	03	2	02	006	Penguatan kapasitas Kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	84 kawasan	-	21 kawasan	21 kawasan	100 %	21 kawasan	42 kawasan	50 %
1	05	03	2	02	008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah personil TRC yang dikembangkan kapasitas teknis dan manajerialnya	81 orang	-	-	-	-	27 orang	27 orang	33,33 %
1	05	03	2	02	0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	24 kawasan	-	90 (org)	90 (org)	100 %	8 kawasan	8 kawasan	33,33 %
1	05	03	2	02	0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian Operasi (Pusdalops) dengan maklumat pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	48 dokumen	-	12 dokumen	12 dokumen	100 %	12 laporan	24 laporan	50 %
1	05	03	2	03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1	05	03	2	03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	200 orang	-	50 orang	1553 orang	>100 %	50 orang	50 orang	801,5 %
1	05	03	2	04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase dokumen penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yang tersusun	100 %	25 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

1	05	03	2	04	0003	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	4 dokumen	-	2 dokumen	2 dokumen	100 %	1 dokumen	3 dokumen	75%
						<i>Tujuan</i> : Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (83,72)	-	A (80)	A (83,70)	104,62	A (83,70)	A (83,70)	99,97 %
						<i>Sasaran</i> : Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (83,72)	-	A (80)	A (83,70)	104,62	A (83,70)	A (83,70)	99,97 %
1	05	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik (84,23)	Baik (84,08)	Baik (80)	Baik (86,45)	108,06	Baik (84,08)	Baik (84,08)	100 %
1	05	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100 %
1	05	01	2	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	48 dokumen	11 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100 %	12 dokumen	35 dokumen	72,92 %
1	05	01	2	01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	80 laporan	9 dokumen	20 laporan	20 laporan	100 %	20 laporan	49 laporan	61,25 %
1	05	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	100 %	100 %	100%	100 %	100%	100%	100 %
1	05	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	100 orang/bulan	13 ASN	14 org/bln	14 org/bln	100 %	25 Orang/bln	52 Orang/bln	52%

1	05	01	2	02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20 laporan	5 dokumen	5 laporan	5 laporan	100 %	5 laporan	15 laporan	75 %
1	05	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100 %
1	05	01	2	05	0002	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	12 paket	-	3 paket	3 paket	100 %	3 paket	6 paket	50 %
1	05	01	2	05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang undangan	100 orang	-	25 orang	25 orang	100 %	25 orang	50 orang	50 %
1	05	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%	93,33 %	100 %	97,14 %	97,14 %	100%	100%	100 %
1	05	01	2	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 paket	-	2 paket	2 paket	100 %	1 paket	3 paket	75 %
1	05	01	2	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 paket	-	3 paket	3 paket	100 %	3 paket	6 paket	50 %
1	05	01	2	06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	12 paket	-	3 paket	3 paket	100 %	3 paket	6 paket	50 %
1	05	01	2	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	32 Paket	-	12 paket	12 paket	100 %	8 paket	20 paket	62,5 %
1	05	01	2	06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	4 paket	-	1 paket	1 paket	100 %	1 paket	2 paket	50 %
1	05	01	2	06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	96 dokumen	-	24 dokumen	24 dokumen	100 %	24 dokumen	48 dokumen	50 %
1	05	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 laporan	50 rakor	50 laporan	40 laporan	80 %	50 laporan	90 laporan	45 %
1	05	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan BMD Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100	-	100 %	100 %	100 %	-	100 %	-
1	05	01	2	07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	8 unit	-	4 unit	4 unit	100 %	-	4 unit	50 %
1	05	01	2	07	0006	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	32 unit	-	20 unit	20 unit	100 %	-	20 unit	62,5 %
1	05	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	88,89 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%

1	05	01	2	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	144 laporan	-	36 laporan	36 laporan	100 %	36 laporan	36 laporan	50 %
1	05	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	52 laporan	-	13 laporan	13 laporan	100 %	13 laporan	26 laporan	50 %
1	05	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100%	87,43 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%
1	05	01	2	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	60 unit	-	15 unit	11 unit	73,33 %	15 unit	26 unit	43,33 %
1	05	01	2	09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	80 unit	-	20 unit	20 unit	100 %	20 unit	40 unit	50 %
1	05	01	2	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	148 unit	10 jenis	37 unit	34 unit	91,89 %	37 unit	71 unit	47,97 %
1	05	01	2	09	0011	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	6 unit	8 jenis	-	-	-	2 unit	2 unit	33,33 %

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mencapai salah satu sasaran yang telah ditetapkan yang dijabarkan dalam tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026, maka penting untuk membangun alternatif-alternatif strategi dan arah kebijakan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2
Tujuan , Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana	Meningkatnya kapasitas daerah dalam menghadapi bencana	Peningkatan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan dalam penanggulangan bencana
			Peningkatan kelurahan tangguh bencana
			Peningkatan sarana prasarana pendukung penanganan bencana
			Optimalisasi koordinasi penanganan bencana
			Pemenuhan prasyarat ketahanan daerah

2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor penghambat / kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan dari misi organisasi. Faktor – faktor dimaksud antara lain sebagai berikut :

1. Faktor Pendorong :

- a. Adanya koordinasi dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana bersama sektoral dan pemerintah daerah;
- b. Tersedianya mekanisme pendanaan yang lebih fleksibel bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c. Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang kuat antara atasan dan bawahan dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga menimbulkan motivasi kerja yang tinggi;
- d. Adanya dukungan OPD terhadap upaya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan;
- e. Pola kerja yang sistemik dan terjadwal sehingga mampu memberikan hasil yang optimal, efektif dan efisien.

2. Faktor Penghambat :

- a. Belum memadainya / Keterbatasan jumlah sumber daya manusia;
- b. Belum tersedianya data – data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam proses penciptaan daerah yang kondusif komprehensif dan berkelanjutan;
- c. Belum memadainya kemampuan untuk menyusun suatu kerangka pembangunan strategis yang benar – benar mencerminkan kondisi, potensi dan kebutuhan masyarakat;
- d. Belum optimalnya kegiatan penelitian dan pengkajian sebagai dasar pengambilan keputusan dalam proses penciptaan yang kondusif;
- e. Masih terdapatnya kebijakan pembangunan pusat yang sering kali berubah karena perkembangan politik.

Dari analisis diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) tahun 2023 dapat dikatakan berhasil walaupun masih banyak dijumpai hambatan dalam pelaksanaannya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya dimasa mendatang perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik. Hal tersebut dapat dijelaskan secara lebih rinci dalam tabel 2.3 sebagai berikut :

TABEL 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar

No.	Indikator	IKU/ IKK/ SPM	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Indikator Sasaran : Indeks Kapasitas Daerah	IKU OPD	0,53	0,55	0,57	0,59	0,61	0,40	0,43	0,43	0,45	0,46	Berdasarkan hasil penilaian yang sudah dilakukan oleh BNPB, Kota Blitar memiliki kapasitas dengan kategori sedang. Untuk mencapai target yang telah ditetapkan diperlukan ; -Kebijakan/Regulasi/Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penanggulangan Bencana -Kelengkapan dokumen dan data dukung indeks kapasitas daerah yang bersumber dari lintas OPD -Komitmen pemerintah, komunitas dan masyarakat terkait pengurangan risiko bencana -Menyusun Strategi untuk meningkatkan kapasitas dan tingkat ketahanan daerah dalam upaya pengurangan risiko bencana di wilayah antara lain melalui tingkat individu, organisasi dan tingkat sistem.
2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	IKK/SPM	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Realisasi Capaian telah mencapai 100% sesuai Target
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	IKK/SPM	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Realisasi Capaian telah mencapai 100% sesuai Target

4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	IKK/SPM	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Realisasi Capaian telah mencapai 100% sesuai Target
---	--	---------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

2.4 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar tidak dapat terlepas dari isu – isu strategis yang melingkupinya. Isu – isu strategis dimaksud antara lain :

1. Belum adanya regulasi terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana;
2. Penyediaan sarana dan prasarana penanganan bencana yang memadai sesuai dengan standar minimal BNPB;
3. Mengedukasi masyarakat agar dapat berperan aktif dalam penanggulangan bencana dengan membentuk kelurahan dan kecamatan tangguh bencana;
4. Peningkatan kapasitas SDM baik secara mandiri maupun dengan mengikuti program-program yang diselenggarakan oleh pusat dan Pemerintah Provinsi;
5. Membangun sistem pelayanan informasi bencana yang terintegrasi pada setiap fase bencana;
6. Peningkatan fasilitas bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan korban terdampak;
7. Meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha melalui program CSR baik pada fase pra bencana, tanggap darurat, maupun pasca bencana;
8. Peningkatan fungsi koordinatif BPBD Kota Blitar dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana untuk merangkul semua pemangku kepentingan penanggulangan bencana, baik di internal pemerintah, maupun lembaga-lembaga terkait kebencanaan, swasta, dan masyarakat.

2.5 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUAPPAS.

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar berdasarkan RKPD Kota Blitar sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja PD se- Kota Blitar yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di Wilayah Kota Blitar.

TABEL 2.5
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025 KOTA BLITAR

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Penanggulangan bencana	Kota Blitar	Persentase SDM penanganan bencana yang terlatih	94 %	903.867.224	Program Penanggulangan bencana	Kota Blitar	Persentase SDM penanganan bencana yang terlatih	94 %	1.152.747.200	
			Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana Kategori Madya	3 kelurahan				Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana Kategori Madya	3 kelurahan		
			Persentase kelengkapan sarana prasarana pendukung penanganan bencana	70 %				Persentase kelengkapan sarana prasarana pendukung penanganan bencana	70 %		
			Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100 %				Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100 %		
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	191.111.900	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	221.103.300	
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)		Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di Kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	950 orang	131.111.900	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)		Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	950 orang	171.103.300	
	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten / Kota		Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah / legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 dokumen	60.000.000	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 dokumen	50.000.000	

	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100 %	385.939.924	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100 %	606.910.600	
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana		Jumlah Kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	21 kawasan	60.869.900	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana		Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan / atau kawasan-kawasan strategis kabupaten / Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	21 kawasan	280.000.000	Mengakomodir usulan musrenbang kecamatan
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten / Kota		Jumlah Personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	27 orang	42.219.340	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten / Kota		Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten / Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	27 orang	42.212.700	
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana		Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1(satu) tahun	1 dokumen	60.000.000	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana		Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten / Kota sampai dengan dinyatakan sah / legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 dokumen	59.960.000	
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah laporan layanan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	12 laporan	161.991.884	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	12 laporan	163.879.100	
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	8 kawasan	60.858.800	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mtigasi bencana	8 kawasan	60.858.800	

	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 %	166.672.800	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 %	172.006.800	
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota		Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong, dan dievakuasi per jenis kejadian bencana	50 orang	83.336.400	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota		Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong, dan dievakuasi per jenis kejadian bencana	50 orang	83.169.200	
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	50 orang	83.336.400	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	50 orang	88.837.600	
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		Persentase dokumen penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yang telah tersusun	100 %	160.142.600	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		Persentase dokumen penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yang telah tersusun	100 %	152.726.500	
	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 dokumen	80.142.600	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 dokumen	68.106.400	
	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten / Kota		Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	20 orang	80.000.000	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten / Kota		Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	20 orang	84.620.100	

	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik (84,16) indeks	3.628.161.082	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik (84,16) indeks	3.869.846.337	- Adanya koreksi identifikasi ulang kebutuhan perangkat daerah - Penyesuaian Pagu anggaran
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	16.610.500	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	6.388.900	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	12 dokumen	3.473.500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	12 dokumen	2.684.300	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 laporan	13.137.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 laporan	3.704.600	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	2.100.119.819	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	2.363.360.774	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	2.097.241.319	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	2.359.651.774	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	5 laporan	2.878.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	5 laporan	3.709.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	124.933.800	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	163.767.400	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 paket	14.902.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	20.902.000	Berdasarkan pemaketan pengadaan barang
	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan		Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	25 orang	110.031.800	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan		Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	25 orang	142.865.400	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia sesuai standar	100 %	276.672.400	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia sesuai standar	100 %	331.787.900	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	10.415.500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	35.230.600	

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 paket	25.092.400	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 paket	27.520.400	Berdasarkan pemaketan pengadaan barang
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	3 paket	6.857.200	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	10.418.700	Berdasarkan pemaketan pengadaan barang
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	8 paket	24.665.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 paket	27.185.000	Berdasarkan pemaketan pengadaan barang
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	1 paket	25.788.300	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	1 paket	38.632.200	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	24 dokumen	3.600.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	24 dokumen	5.400.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 laporan	180.254.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 laporan	187.401.000	

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100 %	300.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100 %	113.620.400	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan		Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	2 unit	70.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan		Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	0	0	Belum menjadi prioritas kebutuhan
	Pengadaan Mebel		Jumlah paket mebel yang disediakan	2 unit	20.000.000	Pengadaan Mebel		Jumlah paket mebel yang disediakan	9 unit	36.754.200	Menyesuaikan kebutuhan
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	5 unit	30.000.000	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	7 unit	76.866.200	Menyesuaikan kebutuhan
	Pengadaan aset tetap lainnya		Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	10 unit	10.000.000	Pengadaan aset tetap lainnya		Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	0	0	Belum menjadi prioritas kebutuhan
	Pengadaan aset tak berwujud		Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	1 unit	20.000.000	Pengadaan aset tak berwujud		Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	0	0	Belum menjadi prioritas kebutuhan

	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	100.000.000	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	0	0	Belum menjadi prioritas kebutuhan
	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	50.000.000	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	0	0	Belum menjadi prioritas kebutuhan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia sesuai standar	100 %	560.437.563	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia sesuai standar	100 %	560.107.063	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	36 laporan	42.612.063	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	36 laporan	41.292.063	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	13 laporan	517.825.500	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	13 laporan	538.815.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai standar	100 %	249.387.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai standar	100 %	310.813.900	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	15 unit	150.957.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	11 unit	185.959.100	Berdasarkan kondisi riil jumlah unit kendaraan
	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang dipelihara	20 unit	5.918.000	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang dipelihara	28 unit	13.198.000	Menyesuaikan kebutuhan
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	37 unit	12.512.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	37 unit	24.947.000	
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	50.000.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	49.975.800	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/direhabilitasi	2 unit	30.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/direhabilitasi	1 unit	36.734.000	Menyesuaikan kebutuhan

2.6 Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada tahun 2025 terdapat usulan kegiatan dari musrenbang Kecamatan sebagai berikut :

TABEL 2.6
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025
KOTA BLITAR

NO.	Usulan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6	7
1	Pentingnya pembinaan kepada Kelurahan Tangguh Bencana (KelTaNa) / Organisasi Relawan	-Program Penanggulangan Bencana -Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana - Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Plosokerep	Jumlah Kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	24 orang	Diakomodir
2	Kurangnya Informasi/pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pencegahan dan penanggulangan bencana	Program Penanggulangan Bencana -Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana - Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Rembang	Jumlah Kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	24 orang	Diakomodir

3	Kurangnya Informasi/pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pencegahan dan penanggulangan bencana	Program Penanggulangan Bencana -Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana - Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Gedog	Jumlah Kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	21 Orang	Diakomodir
4	Pentingnya pembinaan kepada Kelurahan Tangguh Bencana (KelTaNa) / Organisasi Relawan	Program Penanggulangan Bencana -Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana - Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Klampok	Jumlah Kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	26 Orang	Diakomodir
5	Kurangnya Informasi/pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pencegahan dan penanggulangan bencana	Program Penanggulangan Bencana -Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana - Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Bendogerit	Jumlah Kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	21 Orang	Diakomodir
6	Pentingnya pembinaan kepada Kelurahan Tangguh Bencana (KelTaNa) / Organisasi Relawan	Program Penanggulangan Bencana -Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan	Karang Tengah	Jumlah Kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan	22 Orang	Diakomodir

		Kesiapsiagaan terhadap Bencana - Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan		kesiapsiagaan bencana		
7	Pentingnya pembinaan kepada Kelurahan Tangguh Bencana (KelTaNa) / Organisasi Relawan	Program Penanggulangan Bencana -Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana - Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Sananwetan	Jumlah Kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	23 Orang	Diakomodir

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024, disebutkan prioritas pembangunan nasional sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan, dengan sasaran :
 - Meningkatkan daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan;
 - Meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian;
 - Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT);
 - Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
 - Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan;
 - Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan;
 - Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi
 - Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi;
 - Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) ; dan
 - Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan, dan Menjamin Pemerataan dengan sasaran :
 - Pembangunan Wilayah Sumatera;
 - Pembangunan Wilayah Jawa-Bali;
 - Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara;
 - Pembangunan Wilayah Kalimantan;
 - Pembangunan Wilayah Sulawesi;
 - Pembangunan Wilayah Maluku; dan
 - Pembangunan Wilayah Papua.
3. Meningkatkan SDM berkualitas dan Berdaya saing, dengan sasaran :
 - Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan;
 - Meningkatkan perlindungan sosial bagi seluruh penduduk;
 - Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan;
 - Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
 - Meningkatkan aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan;
 - Meningkatkan produktivitas dan daya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, dengan sasaran:
 - Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya;
 - Meningkatkan pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan;
 - Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial;
 - Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat;

- Meningkatkan ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa; dan
 - Meningkatkan budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, dengan sasaran :
- Meningkatkan penyediaan infrastruktur layanan dasar;
 - Meningkatkan konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar;
 - Meningkatkan layanan infrastruktur perkotaan;
 - Meningkatkan layanan energi dan ketenagalistrikan; dan
 - Meningkatkan layanan infrastruktur TIK.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dengan sasaran :
- Meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
 - Berkurangnya Kerugian Akibat Dampak Bencana dan Bahaya Iklim; dan
 - Meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terhadap baseline.
7. Memperkuat Stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik dengan sasaran :
- Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-Lembaga Demokrasi, dan Terjaganya Kesetaraan Warga Negara secara Optimal;
 - Optimalnya Kebijakan Luar Negeri;
 - Meningkatkan Penegakan Hukum Nasional yang Mantap;
 - Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik; dan
 - Terjaganya Stabilitas Keamanan Nasional.

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2024 diselaraskan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui agenda pembangunan yang perlu dilakukan Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

- a. peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- b. peningkatan ketahanan bencana dan iklim; serta
- c. pembangunan rendah karbon.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. peningkatan kualitas lingkungan hidup, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - 2) penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - 3) pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
 - 4) penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang Sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- b. peningkatan ketahanan bencana dan iklim, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) penanggulangan bencana; dan
 - 2) peningkatan ketahanan iklim.
- c. pembangunan rendah karbon, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

- 1) pembangunan energi berkelanjutan;
- 2) pemulihan lahan berkelanjutan; dan
- 3) pengembangan industri hijau.

Berdasarkan arah kebijakan Nasional Tahun 2024, maka dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana sedangkan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien ;
- b) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh ;
- c) Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, logistik dan peralatan;
- d) Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi OPD untuk mencapai dan melaksanakannya dalam tahun tertentu. Sehingga ditentukan indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun 2025 - 2026

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Tahun 2023		Perkiraan Realisasi Tahun 2024	Target	
					Target	Realisasi		2025	2026
1	Tujuan : Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana	Indikator Tujuan : Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Instrumen untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi baik di tingkat kabupaten, kota dan provinsi. Terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah mengatur penanggulangan bencana menjadi urusan wajib daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah.	Nilai Indeks berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh BNPB	0,58	0,43	0,43	0,62	0,65
	Sasaran : Meningkatnya kapasitas daerah dalam menghadapi bencana	Indikator sasaran : Indeks kapasitas daerah	Instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya	Nilai Indeks berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh BNPB	0,55	0,43	0,43	0,59	0,61

			tetap. Tiga hal tersebut yaitu : Indeks Kapasitas, kerentanan, dan ancaman bencana. Hasil pengukuran tersebut dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kajian risiko bencana dan rencana penanggulangan bencana yang juga sebagai input pengukuran penurunan Indeks Risiko Bencana Kabupaten / Kota						
2	Tujuan : Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah Sasaran : Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Indikator Tujuan : Nilai SAKIP Perangkat Daerah Indikator Sasaran : Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai hasil penilaian evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilakukan oleh Inspektur Daerah terhadap komponen besar manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, Pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi internal Nilai hasil penilaian evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilakukan oleh Inspektur Daerah terhadap komponen	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP BPBD yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Nilai Hasil Evaluasi SAKIP BPBD yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah	A(80) A(80)	A(83,70) A(83,70)	A(83,70) A(83,70)	A(83,71) A(83,71)	A(83,72) A(83,72)

			besar manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, Pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi internal						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.3 Data Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
1					2	3	4
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Mendukung Pencapaian Tupoksi
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	
1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	
1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	

1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	
1	05	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	
1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	
1	05	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia sesuai standar	
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	
1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	

1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	
1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	
1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	
1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia sesuai standar	
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai standar	
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	

1	05	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	
1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	
1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	
1	05	01	2.09	0011	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase SDM penanganan bencana yang terlatih	Mendukung pencapaian SPM dan IKK
						Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana Kategori Madya	
						Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	
						Persentase kelengkapan sarana prasarana pendukung penanganan bencana	
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	
1	05	03	2.01	0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	

1	05	03	2.01	0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	
1	05	03	2.02	0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau Kawasan-kawasan strategis kabupaten/kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	
1	05	03	2.02	0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil Tim Reaksi Cepat (TRC PB) kabupaten/kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	
1	05	03	2.02	0023	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) kabupaten/kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	
1	05	03	2.02	0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di Kawasan tempat tinggalnya	
1	05	03	2.02	0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara termasuk kelompok rentan di Kawasan	

						rawan bencana kabupaten / kota yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	
1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase dokumen penataan Sistem Dasar penanggulangan bencana yang telah tersusun	
1	05	03	2.04	0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	
1	05	03	2.04	0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kab./Kota	Jumlah Aparatur BPBD Kab./Kota dan lintas perangkat daerah Kab./Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2025 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas Badan Penanggulangan Bencana Daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah. Adapun prioritas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar adalah pada kegiatan yang mendukung capaian SPM sebagai berikut :

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Tindak lanjut LKJIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar tahun 2023 Sebagaimana tercantum pada tabel 4.1 adalah :

1. Meningkatkan fungsi koordinatif BPBD Kota Blitar dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk merangkul semua pemangku kepentingan penanggulangan bencana, baik di internal pemerintah maupun lembaga-lembaga terkait kebencanaan, swasta dan masyarakat;
2. Menyusun kebijakan/regulasi/peraturan daerah yang mengatur tentang penanggulangan bencana.

Sedangkan rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025 dan prakiraan maju Tahun 2026 adalah sebagaimana tercantum pada tabel 4.2.

Terdapat 2 program, 11 kegiatan, dan 33 Sub Kegiatan pada Badan Penanggulangan bencana Daerah Kota Blitar, dengan pagu indikatif Tahun 2025 sebesar Rp. 5.022.593.537,- dan Prakiraan maju rencana tahun 2026 dengan pagu indikatif Rp. 5.247.373.213,-

Tabel 4.1

**RENCANA TINDAK LANJUT LKJIP BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2023
PADA RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2025**

No.	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
1.	Meningkatkan fungsi koordinatif BPBD Kota Blitar dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk merangkul semua pemangku kepentingan penanggulangan bencana, baik di internal pemerintah maupun Lembaga-lembaga terkait kebencanaan, swasta dan masyarakat	Meningkatkan kerjasama antar Lembaga, instansi Pemerintah, Swasta dan organisasi relawan secara berkelanjutan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	Program Penanggulangan Bencana Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Sub Kegiatan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten / Kota Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota
2.	Menyusun kebijakan/regulasi/peraturan daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana	Segera Menyusun Perda Penanggulangan Bencana	Program Penanggulangan Bencana Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Sub Kegiatan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten / Kota

Tabel 4.2

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

Kode	Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5.022.593.537				5.247.373.213
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				5.022.593.537				5.247.373.213
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Baik (84,16) indeks	3.869.846.337			Baik (84,23) indeks	4.036.988.653
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar		100 %	6.388.900			100 %	6.708.345
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	2.684.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	2.818.515
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerjadan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Laporan	3.704.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 Laporan	3.889.830
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuaistandar		100 %	2.363.360.774			100%	2.455.278.812
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Orang/ bulan	2.359.651.774	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		25 Orang/ bulan	2.451.384.362

1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Laporan	3.709.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Laporan	3.894.450
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar		100 %	163.767.400			100 %	171.955.770
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	20.902.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	21.947.100
1.05.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Orang	142.865.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		25 Orang	150.008.670
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia sesuai standar		100 %	331.787.900			100 %	348.377.295
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	35.230.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	36.992.130
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	27.520.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	28.896.420
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	10.418.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	10.939.635
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	27.185.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	28.544.250
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	38.632.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	40.563.810

1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24 Dokumen	5.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		24 Dokumen	5.670.000
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Laporan	187.401.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 Laporan	196.771.050
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan		100 %	113.620.400			100 %	119.301.420
1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 unit	36.754.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9 unit	38.591.910
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 unit	76.866.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 unit	80.709.510
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia sesuai standar		100 %	580.107.063			100 %	609.112.416
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36 Laporan	41.292.063	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		36 Laporan	43.356.666
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 Laporan	538.815.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		13 Laporan	565.755.750
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai standar		100 %	310.813.900			100 %	326.254.595
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11 Unit	185.959.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		11 Unit	195.157.055
1.05.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28 Unit	13.198.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		28 Unit	13.857.900

1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37 Unit	24.947.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		37 Unit	26.194.350
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 unit	49.975.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 unit	52.474.590
1.05.01.2.09.0011	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	36.734.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	38.570.700
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase SDM penanganan bencana yang terlatih		94 %	1.152.747.200			95 %	1.210.384.560
		Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana Kategori Madya		3 kelurahan				3 kelurahan	
		Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana		100 %				100 %	
		Persentase kelengkapan sarana prasarana pendukung penanganan bencana		70 %				80 %	
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		100 %	221.103.300			100 %	232.158.465
1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	950 Orang	171.103.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		950 Orang	179.658.465
1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	52.500.000
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		100 %	606.910.600			100 %	637.256.130

1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau Kawasan-kawasan strategis kabupaten/kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21 Kawasan	280.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		21 Kawasan	294.000.000
1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) kabupaten/kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	27 Orang	42.212.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		27 Orang	44.323.335
1.05.03.2.02.0023	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) kabupaten/kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	59.960.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	62.958.000
1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di Kawasan tempat tinggalnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 laporan	163.879.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 laporan	172.073.055
1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara termasuk kelompok rentan di Kawasan rawan bencana kabupaten / kota yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Kawasan	60.858.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8 kawasan	63.901.740
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		100 %	172.006.800			100 %	180.607.140
1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang	83.169.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 Orang	87.327.660
1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang	88.837.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 Orang	93.279.480
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase dokumen penataan Sistem Dasar		100 %	152.726.500			100 %	160.362.825

		penanggulangan bencana yang telah tersusun							
1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	68.106.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	71.511.720
1.05.03.2.04.0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kab./Kota	Jumlah Aparatur BPBD Kab./Kota dan lintas perangkat daerah Kab./Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 orang	84.620.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 orang	88.851.105

BAB V PENUTUP

Dari uraian – uraian seperti tersebut diatas terdapat catatan penting yang perlu mendapat perhatian yaitu bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan Badan komponen daerah yang mengemban tugas sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah, yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah (Walikota) dalam menentukan dan melaksanakan kebijaksanaan di Bidang penanggulangan bencana. Mengingat betapa strategis tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, maka sangat mengharapkan dukungan sesama pihak dari instansi terkait untuk saling mengembangkan jaringan komunikasi, koordinasi dan informasi yang lebih intensif.

Kaidah-kaidah yang dipedomani adalah bahwa dalam pelaksanaan tugas harus berpedoman pada Renja Tahun 2025 sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya terutama dalam kaitannya dengan pencapaian target dan indikator perangkat daerah yang telah ditetapkan; serta menjaga keselarasan dan konsistensi antara RKPD, Renja, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) antara lain program/kegiatan, indikator, dan target.

Rencana Tindak Lanjut dengan ditetapkannya Renja Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Blitar Tahun 2025 untuk kemudian dituangkan ke dalam DPA.

Blitar, - - 2024

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kota Blitar

